

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Alisman

Dosen Fakultas Ekonomi Univesitas Teuku Umar, Meulaboh

ABSTRACT

Poverty is a problem that must be economic sososial require special attention and the government. eradication of poverty is an obligation that must diselasaikan by the government for the welfare of masyarakat. Penelitian aims to determine the effect of local revenues and equalization fund against poverty in Nagan Raya. Data analysis model used in this study using the method OLS with multiple linear regression analysis. The results showed that the original income variable significant negative effect on poverty in Nagan Raya. Variabel equalization funds also have a significant negative effect on poverty in Nagan Raya. Simultaneous test results showed that the variables of local revenue and the balance funds have a significant effect on poverty in Nagan Raya.

Keywords: Regional Income, Balance Fund, Poverty

1. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya. Sebagai dampak tersebut, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda.

Dengan diterapkannya otonomi daerah tersebut membawa konsekuensi akan adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah yang mencakup penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Undang-Undang mengharapkan dengan otonomi dan pelimpahan wewenang tersebut pemerintahan daerah mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan kinerjanya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah. Permasalahan kemiskinan di Provinsi Aceh nampaknya juga masih menunjukkan masih

relatif tinggi dibandingkan beberapa Provinsi lain di Indonesia terutama di Pulau Jawa, dan DKI Jakarta dimana tingkat kemiskinan sudah semakin kecil. tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh terjadi diseluruh daerah kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2010-2017 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
2010	139.663	33.490	24,07
2011	142.663	33.570	23,38
2012	149.009	32.700	22,27
2013	158.956	32.660	21,75
2014	162.448	31.913	20,85
2015	155.070	31.320	20,13
2016	158.223	30.310	19,25
2017	162.146	31.060	19,34

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya (2017)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya terlihat

menurun disetiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 sebesar 24,07 persen, jumlah ini menurun pada tahun 2011 yakni sebesar 23,38 persen. penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2016 di mana persentase penduduk miskin tercatat sebesar 19,34 persen. Terjadinya penurunan persentase kemiskinan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. salah satu wujud dari adanya peran pemerintah dapat dilihat dari alokasi belanja yang digunakan untuk membiaya program-program pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja daerah pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Fenomena yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Perkembangan PAD di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2017

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	11.006.703.491	-
2011	15.992.400.727	45,30
2012	27.689.044.994	73,14
2013	37.942.005.578	37,03
2014	65.177.801.946	71,78
2015	79.938.395.926	22,65
2016	104.202.917.807	30,35
2017	72.050.240.201	-30,86

Sumber: BPKD Kab. Nagan Raya (2017)

Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2010-2017 yang menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 realisasi PAD tercatat sebesar Rp 11.006.703.491, jumlah ini terjadi peningkatan cukup drastis pada tahun 2011 menjadi Rp 15.992.400.727 peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2016 yaitu tercatat sebesar Rp 104.202.917.807. Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan realisasi pajak

daerah dan pendapatan zakat, infaq dan sedekah. disamping itu tingginya PAD juga disebabkan oleh pembangunan perusahaan swasta seperti PLTU, PLTA dan perkebunan kelapa sawit. Adanya peningkatan realisasi PAD dapat digunakan untuk menunjang pembiayaan pembangunan sehingga dapat mendorong terjadi peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan (Pemda) Pemerintah Daerah, (Pempus) Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Berdasarkan pada gambaran tersebut maka pemerintah daerah dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui belanja modal yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan belanja modal diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan.

2. Kajian Teoritis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan Asli Daerah terdiri dari, Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Beberapa sumber PAD yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah,

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, yaitu terutama peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (Bratakusumah dan Solihin, 2004).

Menurut Kuncoro (2004) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, jenis-jenis Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perusahaan panas bumi dan perikanan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

c. Dana Alokasi khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke daerah tertentu. untuk membiayai kebutuhan khusus.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus di daerah tertentu. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kuncoro, 2004)

Menurut Arissya (2011) Tujuan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya pemerintahan dengan ekonomi yang kuat dan sanggup berjalan dengan kemampuan administrasi sendiri.
2. Terciptanya pelayanan yang semakin baik.
3. Kesejahteraan yang semakin membaik.
4. Pemerintah daerah mendapatkan jatah dari hasil kerjanya.
5. Tercapainya suatu sistem kerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
6. Terdorong otonomi daerah dengan keterlibatan operasional oleh pemerintah pusat.

Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut BPS (2013) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya pangan dan gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan minyak dan lemak dan lain lain. Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut,

maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Kategori kemiskinan menurut BPS dapat dilihat beberapa aspek diantaranya berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2004) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga

kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

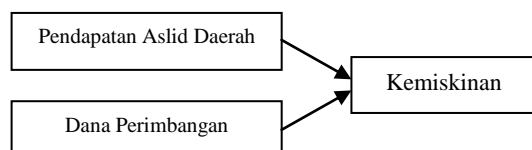
Banyak perspektif yang menjelaskan jenis-jenis kemiskinan. Menurut Kuncoro, (2004:156) terdapat empat jenis kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif yang melihat kemiskinan dari segi pendapatan, sementara kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural yang melihat kemiskinan dari segi penyebabnya.

1. Kemiskinan *absolut* terjadi apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan struktural ialah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih.
4. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk

membantunya. Sedangkan, kebudayaan kemiskinan, merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas.

Kerangka Konseptual

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal pembangunan daerah yang bisa digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan, namun tanpa adanya bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan daerah belum mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri oleh karenanya dana perimbangan dianggap penting bagi pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metodologi

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi PAD, dana perimbangan dan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2010-2017. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series*. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKAD) Kabupaten Nagan Raya.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang diformulasikan sebagai berikut (Gujarati, 2010: 245):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Persamaan tersebut ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural sebagai berikut :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu$$

Keterangan : Y = kemiskinan
 β_0 = Intercept/konstanta

β_1, β_2 = koefisien Regresi
 X_1 = pendapatan asli daerah
 X_2 = dana perimbangan
 μ = Error Term

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya

PAD merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu peran pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah PAD, peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah. Perkembangan PAD di Kabupaten Nagan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 3. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nagan Tahun 2005-2017

No	Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2005	8.105.531.300	-
2	2006	8.564.740.800	5,67
3	2007	9.978.255.000	16,50
4	2008	10.642.155.000	6,65
5	2009	10.327.988.000	(2,95)
6	2010	11.006.703.491	6,57
7	2011	15.992.400.727	45,30
8	2012	27.689.044.994	73,14
9	2013	37.942.005.578	37,03
10	2014	65.177.801.946	71,78
11	2015	79.938.395.926	22,65
12	2016	104.202.917.807	30,35
13	2017	72.050.240.201	(30,86)

Sumber: BPKD Kab. Nagan Raya, (2018)

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2005-2017 terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2005 realisasi PAD sebesar Rp 8.105.531.300, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar Rp 8.564.740.800 atau tumbuh 5,67 persen. Tingkat pertumbuhan ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp

9.978.255.000 atau tubuh 16,50 persen, kemudian pada tahun 2008 realisasi PAD kembali meningkat sebesar 10.642.155.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,65 persen. Peningkatan pendapatan asli daerah disebabkan oleh tumbuhnya realisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah, namun peningkatan tersebut menurun pada tahun 2009 yakni sebesar Rp10.327.988.000 atau turun menjadi 2,95 persen.

Peningkatan realisasi PAD kembali terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 11.006.703.491, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar Rp 15.992.400.727. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2016 yaitu tercatat sebesar Rp 104.202.917.807. Peningkatan PAD tidak terlepas dari peningkatan realisasi pajak daerah dan pendapatan zakat, infaq dan sedekah, disamping itu tingginya pendapatan asli daerah juga disebabkan oleh pembangunan perusahaan swasta seperti PLTU, PLTA dan perkebunan kelapa sawit. Kendati demikian PAD mengalami penurunan hingga tahun 2017 yakni sebesar Rp 72.050.240.201 atau turun 30,86 persen, hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan retribusi dan pajak daerah dikarenakan kurang efektifnya pengutan sumber-sumber keuangan daerah, namun meskipun tingkat pertumbuhan pada tahun 2017 mengalami penurunan namun secara keseluruhan realisasi PAD cenderung meningkat.

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Nagan Raya

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan suatu bentuk kebijakan yang tempuh oleh pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Disamping itu ada transfer dana dari pemerintah pusat juga merupakan wujud dari kepedulian pemerintah pusat membangun daerah. Transfer pemerintah pusat ini di berikan melalui dana perimbangan. Perkembangan dana perimbangan di Kabupaten Nagan Raya dapat di lihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 4 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2017

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2005	283.200.200.403	
2006	287.098.412.020	1,38
2007	313.209.621.000	9,09
2008	342.160.000.032	9,24
2009	376.397.842.200	10,01
2010	398.914.793.842	5,98
2011	494.968.577.332	24,08
2012	514.049.896.523	3,86
2013	617.761.318.258	20,18
2014	914.449.099.429	48,03
2015	1.028.697.943.348	12,49
2016	1.149.198.638.164	11,71
2017	1.136.525.295.025	-1,10

Sumber: BPKD Nagan Raya, (2018)

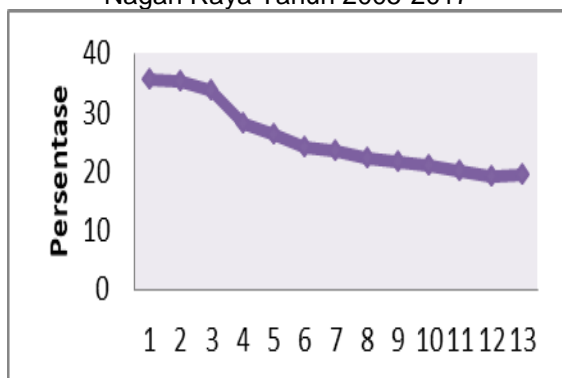
Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2005-2017 realisasi dana perimbangan cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 283.200.200.403, pada tahun 2006 menjadi Rp 287.098.412.020 atau tumbuh sebesar 1,38 persen, kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2007 naik menjadi Rp 313.209.621.000 atau tumbuh sebesar 9,09 persen, peningkatan ini terjadi hingga tahun 2008 menjadi Rp 342.160.000.032 kemudian terus terjadi peningkatan hingga tahun 2016 menjadi Rp 1.149.198.638.164 atau tumbuh sebesar 11,71 persen, namun tingkat pertumbuhan tersebut turun pada tahun 2017 sebesar 1,10 persen. Dari table juga memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan dana perimbangan yang mengalami flukutasi di setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan berkisar antara -1,10-48,03 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 48,03 persen dan terendah pada tahun 2017 yaitu turun sebesar 1,10 persen. Fluktuasi pertumbuhan dana perimbangan ini disebabkan oleh terjadinya fluktuasi pada jenis komponen dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah

daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dapat juga dikatakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah kemiskinan, disamping masalah-masalah yang lainnya. Dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2017



Sumber: BPS Nagan Raya, (2018)

Grafik 2 memperlihatkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2005-2017, di mana tingkat kemiskinan

terlihat menurun disetiap tahunnya pada tahun 2005 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 35,445 persen. Jumlah ini menurun pada tahun 2006 sebesar 35,24. penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2016 yaitu sebesar 19,25 persen. Terjadinya penurunan persentase kemiskinan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Salah satu wujud dari adanya peran pemerintah dapat dilihat dari alokasi dana perimbangan yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan termasuk dalam mengantisipasi kegagalan pasar dalam perekonomian sangat penting. Perannya melalui kebijakan fiskal ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan). Kendati demikian pada tahun berikutnya tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan sebesar 19,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengoptimalkan dana perimbangan sehingga tingkat kemiskinan tidak bisa ditekan secara maksimal.

Analisis Regresi

Hasil analisis regresi linier berganda merupakan suatu model yang digunakan untuk melihat pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel independen (PAD dan dana perimbangan) dan satu variabel dependen yakni (kemiskinan). Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
Constant	17,30	4,12		4,19	0,00
X1	-0,20	0,16	-0,67	-6,08	0,04
X2	-0,38	0,29	-1,57	-7,46	0,05
R = 0,921					
R ² = 0,819					
F Hitung = 28,097					

Sumber: Hasil Regresi SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\ln Y = 17,305 - 0,203 \ln X_1 - 0,384 \ln X_2$$

Nilai konstanta sebesar 17,305. Hal ini berarti apabila variabel bebas yakni Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan tidak mengalami perubahan atau tetap, maka kemiskinan sebesar 17,30 persen. Koefisien regresi untuk variabel PAD (X_1) sebesar -0,203 yang berarti bahwa setiap kenaikan PAD 1 persen maka kemiskinan menurun menjadi 0,20 persen. Koefisien regresi variabel dana perimbangan (X_2) sebesar -0,384. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan dana perimbangan 1 persen maka kemiskinan menurun sebesar 0,384 persen.

Pengujian Hipotesis

Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dalam kurun waktu 2005-2017.

Uji koefisien korelasi (R) sebesar 0,921, menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dan dependen yakni PAD dan dana perimbangan terhadap kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sebesar 92,1 persen, hubungan ini termasuk dalam kategori kuat. Sementara uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,819. Hal ini mengandung arti bahwa kemiskinan sebesar 81,9 persen dipengaruhi oleh PAD dan dana perimbangan dan sisanya sebesar 18,1 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah guna memenuhi pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mampu menekan tingkat kemiskinan tahun 2005-2017, dengan kata lain PAD memiliki korelasi negatif terhadap kemiskinan. Artinya bahwa apabila PAD meningkat maka mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang disampaikan oleh Andy et. al (2015) Pratomo (2015) dan Dewi dkk (2015) bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang sangat memiliki peranan penting dalam penurunan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah harus terus berupaya semaksimal mungkin dalam mengali

potensi-potensi daerahnya sehingga sumber pendapatan dapat dioptimalkan sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah yang sedang berkembang ketergantungan terhadap dana perimbangan masih sangat besar, bahkan hampir dipastikan apabila tidak ditopang dengan dana perimbangan maka pembangunan di Kabupaten Nagan Raya akan jalan ditempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Artinya bahwa apabila dana perimbangan mengalami peningkatan maka mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Pengaruh dana perimbangan terhadap kemiskinan lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pengalokasian dana perimbangan harus betul-betul di prioritaskan pada program-program pembangunan ekonomi seperti infrastruktur dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh Andy et. al (2015) Pratomo (2015) dan Dewi dkk (2015). Dana perimbangan merupakan unsur penting dalam penanggulangan kemiskinan oleh karena itu peran pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.
2. Dana perimbangan berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber keuangan daerah sehingga dapat membantu membiaya penanggulangan kemiskinan
2. Pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya diharapkan dapat mengalokasikan dana

- perimbangan dengan baik dan untuk pembangunan daerah yang lebih merata sehingga mampu memberikan menurunkan angka kemiskinan
3. Kepada peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencari faktor lain diluar model ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
 4. Kepada masyarakat diharapkan dapat mengawasi pengalokasian anggaran dana keseimbangan oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Andy et. al 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Bappenas. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia*. BPS. Jakarta.
- Bahar, Ujang. 2009. *Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri*. kembangan Jakarta Barat.
- Bratakusumah, dan Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Edisi Kedua. PT. Macana Jaya Cemerlang. Jakarta
- Devas, Nick, et al. 2007, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press.
- Dewi ddk 2015. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan Iqbal, Misbahuddin 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Edisi Kedua. Bumi Aksara Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004 *Otonomi Daerah: Reformasi, Strategi, dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Pratomo (2015) Melakukan Penelitian Dengan Judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Samudra, Azhari, Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2015. *Statistik Terapan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensif, dan NonParametrik*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Whidjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah